

MEMPERKUAT FUNGSI NEGARA DI TENGAH KEPUNGAN ELITE DAN PRAKTIK POLITIK DINASTI DI INDONESIA

Ferdaus Satrio¹⁾, Romiyansah²⁾, Valentina Azzahra³⁾, Rudi Santoso⁴⁾

^{1,2,3&4}Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung

Email: ¹Firdaussatrio940@gmail.com, ²romiy4604@gmail.com,

³valenthinaazzahra14@gmail.com, ⁴rudisantoso@radenintan.ac.id

Abstract

This study examines the weakening of state functions in Indonesia caused by the consolidation of elite power and the proliferation of political dynasties. The primary objective is to analyze how elite capture undermines democratic institutions and to propose strategic measures for strengthening the state's autonomy. Using a qualitative research method with a descriptive-analytical approach, this study utilizes secondary data from recent electoral trends and academic literature on oligarchy and clientelism. The results indicate that the rise of political dynasties accounting for 26.8% of candidates in the 2024 local elections has transformed state institutions into instruments for protecting narrow elite interests rather than providing public service. This systemic capture results in a decline in meritocracy and legal supremacy. To strengthen the state, this research suggests structural reforms in political party recruitment, the reinforcement of judicial independence, and increased public oversight. The study concludes that reclaiming the state's neutrality is essential to preventing further democratic backsliding and ensuring equitable governance.

Keywords: *Elite Capture; Indonesia; Oligarchy; Politics Dynasty; State Function*

Abstrak

Studi ini meneliti pelemahan fungsi negara di Indonesia yang disebabkan oleh konsolidasi kekuasaan elit dan proliferasi dinasti politik. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis bagaimana penguasaan elit melemahkan lembaga demokrasi dan untuk mengusulkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat otonomi negara. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, studi ini memanfaatkan data sekunder dari tren pemilihan umum terkini dan literatur akademis tentang oligarki dan klientelisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya dinasti politik yang mencakup 26,8% kandidat dalam pemilihan lokal 2024 telah mengubah lembaga negara menjadi instrumen untuk melindungi kepentingan elit yang sempit daripada menyediakan pelayanan publik. Penguasaan sistemik ini mengakibatkan penurunan meritokrasi dan supremasi hukum. Untuk memperkuat negara, penelitian ini menyarankan reformasi struktural dalam perekrutan partai politik, penguatan independensi peradilan, dan peningkatan pengawasan publik. Studi ini menyimpulkan bahwa mengembalikan netralitas negara sangat penting untuk mencegah kemunduran demokrasi lebih lanjut dan memastikan tata kelola yang adil.

Kata Kunci: *Fungsi Negara; Indonesia; Oligarki; Perebutan Kekuasaan Elit; Politik Dinasti*

PENDAHULUAN

Setelah perubahan tahun 1998, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk bersinar sebagai pemimpin demokrasi di Asia Tenggara dengan mendorong pemerintahan yang adil, terbuka, dan tidak terpengaruh oleh kelompok kepentingan tertentu. Namun, memasuki dekade ketiga transisi demokrasi, realitas politik menunjukkan tren yang mengkhawatirkan terjadinya perebutan negara oleh kekuatan elit lama dan baru yang terkonsolidasi secara rapi. Hal ini bukan hanya tentang aliran kekuasaan biasa; ini merupakan langkah terencana untuk menjadikan negara sebagai alat untuk melindungi orang-orang kaya dan berkuasa. Jeff Winters menunjukkan bahwa oligarki di Indonesia saat ini adalah tentang melindungi kekayaan mereka, yang mereka gunakan untuk menyelinap ke dalam pembuatan undang-undang dan penegakan hukum demi kepentingan mereka sendiri.

Hal ini menjadi lebih buruk lagi karena maraknya politik yang dijalankan oleh keluarga secara terang-terangan. Politik dinasti di Indonesia tidak lagi hanya tentang ikatan keluarga; ini lebih merupakan rencana cerdas untuk merebut dan mempertahankan kendali ekonomi lokal dalam jangka panjang. Data terakhir menunjukkan bahwa dalam kontestasi politik lokal pada tahun 2024, prevalensi kandidat yang berafiliasi dengan dinasti politik mencapai angka yang signifikan yaitu 26,8%. Angka tersebut mencerminkan adanya sumbatan sirkulasi elit yang sehat, yang pada akhirnya mematikan prinsip meritokrasi dalam birokrasi. mengamankan proyek pengadaan barang dan jasa serta konsesi sumber daya alam di daerah.

Selain itu, dominasi elit politik dan dinasti perlahan-lahan menggerogoti supremasi hukum. Ketika lembaga-lembaga tinggi pemerintah seperti parlemen dan pengadilan mulai terpengaruh oleh ikatan kekeluargaan, seluruh sistem checks and balances hanya menjadi formalitas yang tidak berarti. Para ahli mengatakan ini adalah tanda kemunduran demokrasi, di mana pemilu tetap berjalan seperti biasa, namun arti sebenarnya dari pemilu telah diambil alih oleh segelintir elit yang berkuasa. Para pendiri negara ini mempunyai gagasan tentang masyarakat yang berbasis aturan Negara ini mungkin sedang menuju negara kekuasaan di mana hanya segelintir elit yang mendapatkan keuntungan melalui kontrol regulasi.

Masalah sebenarnya adalah bahwa partai politik tidak melakukan apa yang mereka inginkan. berfungsi sebagaimana mestinya sebagai tulang punggung demokrasi, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam memilih pemimpin Partai politik sering kali berubah menjadi perusahaan swasta atau bisnis yang dikelola keluarga di mana hubungan keluarga mengalahkan keterampilan dan kejujuran. Akses yang tidak adil ini menyebabkan ketidaktertarikan publik dan melemahkan peran pengawas masyarakat atas tindakan pemerintah. Tanpa adanya perubahan hukum dan perombakan besar-besaran dalam cara kerja partai politik, pemerintah akan semakin memburuk, berubah menjadi hanya sebuah kantor yang suka memerintah yang melayani kebutuhan keluarga berkuasa dan orang kaya.

Jadi, artikel ini bertujuan untuk melihat lebih dekat struktur pengepungan tingkat tinggi dan memberikan tips yang kuat untuk meningkatkan kemandirian negara. Dengan menggali statistik pemilu terbaru dan memeriksa apa yang dikatakan para ahli tentang politik dan uang, penelitian ini menunjukkan bahwa membuat pemerintah lebih kuat berarti memiliki keberanian untuk memutuskan ikatan favoritisme dan menempatkan hukum di atas tujuan egois dari mereka yang berkuasa.

METODE PENELITIAN

Artikel ini bukan sekadar keluhan tanpa alasan. Penelitian ini dibangun di atas pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Sederhananya, penelitian ini mengumpulkan cuplikan fakta dari berbagai sumber dan menyatukannya untuk memberikan gambaran luas tentang bagaimana oligarki dan dinasti politik mengepung negara kita

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan studi literatur dan data sekunder sebagai bahan baku utamanya. Saya menggali data dari berbagai gudang informasi yang kredibel, antara lain:

1. Data Statistik Pemilu: mengumpulkan-angka terbaru mengenai sebaran kandidat dinasti pada kontestasi politik 2024 untuk melihat seberapa besar sumbatan sirkulasi elit yang terjadi.
2. Dokumen Hukum dan Regulasi: Memeriksa aturan utama dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik yang sering kali menjadi celah legal bagi para elit untuk melanggar kekuasaan.
3. Literatur Akademik: Menggunakan pemikiran kritis dari para ahli seperti Jeffrey Winters mengenai oligarki dan penelitian-riiset terbaru dari jurnal nasional maupun internasional (seperti Jurnal Iustum Quia Iustum dan IPSSJ) yang sudah disebutkan sebelumnya.

Teknik Pengumpulan Data: Dokumentasi Digital

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi yang teliti. Penulis melakukan penelusuran terhadap laporan-laporan pemantauan pemilu, artikel berita yang mendalam, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tren politik dinasti di era otonomi daerah. Semua data ini kemudian disaring untuk memastikan hanya informasi yang paling valid dan terkini yang masuk ke dalam analisis. Setelah mengumpulkan semua data, kami melanjutkan analisis secara sistematis dengan mengikuti langkah - langkah berikut:

1. Reduksi data: Pilah informasi mana yang hanya sekedar kegaduhan politik dan mana yang benar - benar menunjukkan kontrol atau kekuasaan pemerintah yang sebenarnya.
2. Penyajian Data: Fakta-faktanya akan kami paparkan secara berurutan, mulai dari isu di tingkat partai hingga ke lingkaran dinasti di daerah dan dampaknya terhadap supremasi hukum.
3. Penarikan Kesimpulan: Mengaitkan teori oligarki Winters dengan realitas politik tahun 2024 dapat memberikan wawasan atau strategi untuk memperkuat kedaulatan nasional.

Pendekatan Analisa: Perspektif Ekonomi - Politik

Penelitian ini menggunakan ilmu ekonomi politik. Artinya, saya tidak hanya melihat politik sebagai pilihan-memilih pemimpin, tetapi melihat maknanya kepentingan uang dan perlindungan di baliknya. Dengan cara ini, artikel ini bisamengapa partai politik sering kali berubah menjadi perusahaan keluarga dan mengapa aturan hukum cenderung tajam ke bawah tetapi tumpul ke lingkaran dinasti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme *State Capture*: Bagaimana Oligarki dan Modal Menjinakkan Hukum

Fenomena *state capture* di Indonesia bukan lagi sekedar teori konspirasi, melainkan sebuah realitas yang bekerja secara sistematis melalui penguasaan institusi negara oleh kepentingan swasta. Analisis menunjukkan bahwa infiltrasi oligarki tidak melalui oposisi langsung terhadap negara, tetapi dengan membeli negara dari dalam Argumen serupa Jeffrey Winters, kekuatan utama oligarki terletak pada kemampuan mereka menggunakan sumber daya material untuk memastikan bahwa kekayaan mereka tetap aman dan terus bertumbuh melalui perlindungan hukum.

Pertama, kita bagaimana melihat proses legislasi di tingkat pusat maupun daerah sering kali terasa seperti pesanan para pemilik modal. Undang-undang atau peraturan daerah (Perda) yang seharusnya melindungi kepentingan publik atau kelestarian lingkungan, sering kali dirombak atau dilemahkan demi memuluskan proyek-proyek strategi tertentu. Cukup jelas bahwa situasi ini menunjukkan supremasi hukum, di mana hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk keadilan (*rechtsstaat*), tetapi sebagai alat kekuasaan (*machtstaat*) untuk memvalidasi tindakan elit. Akibatnya, kita melihat pola penguasaan regulasi.

Kedua, lembaga keuangan besar telah menciptakan apa yang dikenal sebagai Aspinall dan Sukmajati, pasar politik yang sangat klientelistik. Dalam kontes politik Indonesia, menghabiskan banyak uang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau kursi legislatif adalah tindakan yang sangat bodoh. Hal membuat kandidat untuk para penyambung dana atau cukong. Hubungan ini adalah awal mula terjadinya balas budi politik pascapemilu. Ketika kandidat menang, kebijakan-kebijakan yang diusungnya dari memilih pemenang proyek infrastruktur besar hingga membagikan konsesi lahan hampir selalu menguntungkan para pendukungnya. Itu sebabnya proyek-proyek besar seringkali hanya berputar-putar di lingkarannya sendiri. Negara tidak lagi menjadi wasit yang adil, melainkan menjadi kantor pelayanan bagi modal kepentingan yang telah mendanai kemenangan politik mereka.

Ketiga, dampak dari *state capture* ini adalah matinya pengawasan internal atau *checks and balances*. Partai politik sebagai mesin utama demokrasi sudah disandera oleh kepentingan pemodal, maka fungsi pengawasan di parlemen hanya menjadi formalitas belaka. Tidak ada lagi kritik yang substantif terhadap kebijakan pemerintah selama kepentingan para elit sudah terakomodasi. Hal ini diperburuk dengan melemahnya institusi-institusi penegak hukum yang secara perlahan mulai terinfiltrasi oleh pengaruh politik dan jaringan kekuasaan. Pada akhirnya, rakyat hanya disuguhi teater demokrasi di permukaan, sementara di balik layar, semua keputusan penting sudah ditentukan oleh konsolidasi elit lama dan baru yang menguasai sumber daya ekonomi negara

Gurita Politik Dinasti: Monopoli Kekuasaan dan Matinya Meritokrasi di Daerah

Jika oligarki bekerja melalui kekuatan modal, maka dinasti politik bekerja melalui kekuatan darah untuk mengunci kontrol ekonomi di tingkat lokal. Data statistik yang menunjukkan prevalensi kandidat berafiliasi dinasti mencapai 26,8% pada kontestasi 2024 bukan sekadar angka mati tetapi ini adalah bukti nyata terjadinya pembekuan sirkulasi kepemimpinan. Dinasti politik di Indonesia telah berevolusi menjadi sebuah rencana cerdas untuk mempertahankan kekuasaan dalam jangka panjang tanpa harus kehilangan kendali atas sumber daya daerah.

Hasil penelitian di berbagai daerah menunjukkan bahwa dinasti politik menciptakan tantangan struktural bagi munculnya pemimpin-pemimpin baru yang kompeten. F. Dona memperhatikan bahwa otonomi daerah telah menjadi panggung bagi elit lokal untuk membangun dinasti yang menggabungkan kekuasaan politik dengan kekuatan bisnis keluarga. Ketika kepala daerah meninggalkan pasangan atau orang tuanya untuk mengunjungi anak-anaknya, tujuannya bukan hanya untuk melanjutkan rencana pembangunannya tapi untuk mempertahankan departemen-departemen di dalam kementerian yang sering diisi oleh orang-orang yang setia kepada dinasti dibandingkan keahlian profesional mereka seperti Kementerian Pekerjaan Umum atau Kementerian Pendidikan adalah pukulan langsung terhadap meritokrasi, menurut Telaumbanua.

Situasi ini berarti masyarakat lokal kehilangan kesempatan untuk dipimpin. Lebih jauh lagi, dominasi dinasti politik ini sering kali terhenti pada penguasaan konsesi sumber daya alam dan proyek pengadaan barang secara tertutup. Karena eksekutif dan daerah sering dikendalikan oleh keluarga atau jaringan yang sama, pengawasan terhadap penggunaan APBD menjadi sangat lemah. Seluruh sistem pemerintahan daerah bekerja akhirnya hanya untuk pengumpulan kekayaan satu keluarga dan kroni-kroninya.

Terakhir, Tim IPSSJ bahwa jika tren dinasti ini tidak segera memutuskan melalui reformasi hukum yang radikal, Indonesia akan dalam prosedur demokrasi yang kosong. Pemilu memang tetap, rakyat tetap datang ke TPS, namun pilihan yang tersedia hanyalah mereka yang memiliki nama keluarga besar dan akses modal tak terbatas. Ini adalah tanda nyata dari kompresi di mana Kekuasaan rakyat telah diambil alih oleh segelintir elit yang

haus kekuasaan. Tanpa adanya perubahan mendasar pada Undang-Undang Partai Politik yang memaksakan adanya transparansi dan rekrutmen berbasis prestasi, dinasti politik akan terus tumbuh subur layaknya parasit yang menggerogoti tubuh demokrasi kita dari dalam.

Partai Politik

Salah satu temuan paling mencolok dalam penelitian ini adalah bagaimana partai-partai politik semakin menjauh dari reformasi. Agenda Partai politik yang seharusnya menjadi kawah candradimuka bagi lahirnya pemimpin-pemimpin berintegritas, justru terjebak dalam fungsi sebagai perantara (*broker*) kepentingan modal dan dinasti. Winarti dan Nazaki mengungkap fakta bahwa kelembagaan partai kita mengalami peningkatan dari dalam mekanisme rekrutmen tidak lagi didasarkan pada rekam jejak atau kompetensi, melainkan pada kedekatan dengan lingkaran elit pusat dan kemampuan finansial untuk membayar tiket pencalonan.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa partai politik sering kali beroperasi layaknya sebuah perusahaan tertutup. Keputusan-keputusan strategis, termasuk penentuan calon kepala daerah dalam Pilkada 2024, diambil melalui proses yang sangat sentralistik di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Hal ini menutup ruang bagi kader-kader potensial di daerah yang mungkin memiliki basis massa dan kapasitas intelektual mumpuni, namun tidak memiliki akses ke pundi-pundi elit pusat. Pola ini secara langsung memfasilitasi suburnya dinasti politik, karena hanya keluarga penguasa yang memiliki kombinasi antara modal finansial besar dan jaringan komunikasi ke elit partai nasional.

Krisis representasi ini menyebabkan masyarakat semakin tidak percaya pada institusi partai. Partai politik dianggap hanya hadir setiap lima tahun sekali untuk memobilisasi suara politik melalui uang, tanpa pernah benar-benar mendukung kebijakan yang pro-rakyat setelah pemilu usai. diperingatkan oleh Aspinall dan Sukmajati, ketika partai politik sudah kehilangan basis ideologinya dan hanya fokus pada pertukaran materi (*patronase*), maka demokrasi kita akan kehilangan jiwa. Kita hanya memiliki cangkang demokrasi, sementara isinya adalah transaksi gelap untuk mengamankan penguasaan sumber daya negara oleh segelintir orang kaya dan keluarga berpengaruh.

Erosi Supremasi Hukum dan Ancaman *Backsliding* Demokrasi

Dampak akhir dari konsolidasi oligarki dan dinasti politik ini adalah pelemahan sistematis supremasi hukum. Lembaga-lembaga tinggi negara mulai dari peradilan hingga lembaga mulai diisi oleh individu-individu yang memiliki ikatan kekeluargaan atau kemandirian modal pada elit tertentu, prinsip kemandirian hukum akan runtuh.⁶⁰ Suteki menerbitkan bahwa negara kekuasaan (*machtstaat*) kini mulai menampakkan wajahnya secara terang-terangan di balik jubah hukum. Hukum tidak lagi digunakan untuk membatasi kekuasaan, melainkan untuk memperkuat dan melegitimasi kekuasaan tersebut.

Penelitian penelitian ini bahwa Indonesia sedang mengalami apa yang disebut para ahli konsep demokrasi (kemunduran demokrasi). Indikatornya jelas: pemilu tetap berjalan secara rutin, esensi dari pemilu tersebut yakni sirkulasi elit yang adil dan terbuka telah dibajak. Politik dinasti bahwa kekuasaan hanya berputar di lingkungan yang sama, sementara oligarki bahwa pun yang menang, kebijakan yang dihasilkan akan tetap menguntungkan kelompok mereka. Namun bahwa jika sistem *checks and balances* terus diperlemah melalui kooptasi lembaga pengawas, maka korupsi akan menyebabkan norma yang tidakkan. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan yang lebar. Di satu sisi, rakyat dibiarkan sendiri di tengah ekonomi, sementara di sisi lain, para elit dinasti dan oligarki dalam akses istimewa regulasi dan konsesi ekonomi. Jika tidak ada langkah radikal untuk mereformasi Undang-Undang Partai Politik dan memperketat aturan mengenai politik dinasti, maka masa depan demokrasi Indonesia akan terus berada dalam pengepungan tingkat tinggi yang pada

akhirnya hanya akan melayani kepentingan egois mereka terhadap yang haus akan kekuasaan dan harta.

SIMPULAN

Demokrasi di Indonesia saat ini masih berada di bawah kekuasaan oligarki dan dinasti politik janji reformasi '98 buat bikin pemerintahan yang adil seolah cuma jadi cerita pengantar tidur karena realitanya negara kita lagi disandera (*state capture*) oleh elit lama dan baru yang mainnya sangat rapi. Seperti yang dikatakan Jeff Winters, negara ini perlahan-lahan menjadi lebih kaya melalui undang-undang yang dibuat oleh orang-orang kaya itu sendiri. Masalahnya semakin memburuk karena partai politik kita telah berubah menjadi bisnis keluarga di mana satu-satunya yang mereka minati adalah bertukar posisi bukan memimpin. Jika lembaga peradilan dan parlemen diisi oleh orang-orang mereka sendiri, sistem *checks and balances* hanya menjadi formalitas mewah tanpa manfaat nyata bagi masyarakat. Jika kita tidak cukup berani untuk berbicara menentang siklus favoritisme ini bahkan dengan perubahan hukum yang radikal, Indonesia mungkin akan menjadi negara yang melayani ego elit sementara mengabaikan orang-orang di pinggiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambardi, K. (2009). *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: KPG.
- Arifin, F. (2025). Politik Dinasti dan Pembaruan Sistem Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Iustum Quia Iustum*.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Patronase dan Klientelisme dalam Politik Elektoral di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov
- Dona, F. (2022). Dinasti Politik di Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif Demokrasi. *Jurnal Al-Ahkam*, 201-235.
- Ipssj Team. (2024). Dinasti Politik dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia. *International Journal Of Politics and Sociology (IPSSJ)*, 12-25
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: Routledge.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suteki. (2022). Hegemoni Oligarki dan Ambruknya Supremasi Hukum. *Jurnal Crepido*, 4(1), 15-33.
- Telaumbanua, R. (2024). Dinasti Politik dan Kualitas Demokrasi di Pemerintahan Daerah Indonesia: Evaluasi dan Perspektif. *Journal of Government*, 45-80.
- Winarti, N., & Nazaki. (2019). *Problematisasi Kelembagaan Partai Politik: Studi Terhadap Fungsi*
- Representasi Partai Politik Pascareformasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 112-152.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarki*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zaskia, A. (2024). *Tantangan Oligarki dan Politik Dinasti dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis*. ResearchGate Publication, 8-42.